


**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Selayang Pandang 2023

Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi
Kepulauan Riau





MENGENAL BPK RI

Memulai Sejarah



Sumber: web.bpk.go.id

Sejarah BPK dimulai dari sini:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk berdasarkan amanat UUD 1945 melalui Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM tanggal 18 Desember 1946 tentang pembentukan BPK. BPK sah dibentuk pada tanggal 1 Januari 1947 di Magelang. Di masa awal pembentukannya, BPK memiliki sembilan orang pegawai yang diketuai oleh R. Soerasno.

Seiring perkembangannya, BPK mengalami beberapa kali perpindahan kedudukan, yaitu di Magelang (1947), Yogyakarta (1948), dan Bogor (1949).

Di masa reformasi (1998), berdasarkan Amendemen Ketiga UUD Tahun 1945 Bab VIII A Pasal 23G, maka ditetapkan bahwa BPK berkedudukan di Ibu Kota Negara dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi.

Lambang BPK RI



Tri Dharma Arthasantosha

Menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, serta prinsip-prinsip penuntun, berupaya mencapai tiga keberhasilan pemeriksaan (keuangan, manajemen dan pengelolaan), menuju terwujudnya kesempurnaan tanggung jawab keuangan negara.



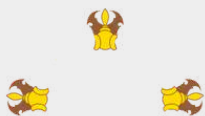
Garuda Pancasila

Menjunjung tinggi dan melestarikan Pancasila dan UUD 1945.



Motif Cakra (Senjata Batara Wisnu)

BPK sebagai alat penjaga pengelolaan keuangan negara.



Tiga Mata Tombak

Tiga ruang lingkup pemeriksaan BPK.



7 Kelopak Teratai

BPK berlandaskan kode etik, Sapta Prasetya Jati, dan ikrar pemeriksa yang berjumlah tujuh lembar.



47 Lengkung

Tahun kelahiran BPK, 1947.



Warna emas lambang keluhuran dan keagungan.



Warna putih lambang kesucian dan kejujuran.

Visi

Menjadi Lembaga Pemeriksa
Tepercaya yang Berperan Aktif
dalam Mewujudkan Tata Kelola
Keuangan Negara yang
Berkualitas dan Bermanfaat
untuk Mencapai Tujuan Negara.

Misi

01

Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan

02

Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara

03

Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya

Dasar Hukum BPK

UU 1945 BAB VIII
PASAL 23E,
23F, DAN 23G

UU NO 17
TAHUN 2003
TENTANG
KEUANGAN
NEGARA

UU NO 1 TAHUN
2004 TENTANG
PERBENDAHARAAN
NEGARA

UU NO 15
TAHUN 2004
TENTANG
PPTJKN

UU NO 15
TAHUN 2004
TENTANG
PPTJKN



Tugas BPK RI

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara yang dilakukan oleh:



Nilai Dasar



Kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

03 Profesionalisme

Kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

Jenis Pemeriksaan

Dalam menjalankan tugas, pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK terdiri dari:

3 jenis

Pemeriksaan Keuangan

Memeriksa laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Hasil pemeriksaan keuangan adalah pernyataan opini.

Pemeriksaan Kinerja

Memeriksa aspek ekonomi, efisiensi, serta efektivitas yang dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Hasil pemeriksaan kinerja adalah rekomendasi.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Memeriksa atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah simpulan.

ANGGOTA BPK RI

"BPK mempunyai 9 orang anggota, yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota."

Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU BPK No. 15 Tahun 2006



Ketua BPK

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA.

Wakil Ketua BPK

Dr. Hendra Susanto, ST.,
M.Eng., M.H., CFrA., CSFA.



Anggota I

Nyoman Adhi
Suryadnyana, S.E., M.E.,
CSFA.



Anggota

II

Ir. Daniel Lumban Tobing,
CSFA., CFrA.

Anggota

III

Prof. Dr. Achsanul Qosasi,
CSFA., CFrA.



Anggota

IV

Haerul Saleh, S.H., CRA.,
CRP.





Anggota V

Ir. H. Ahmadi Noor Supit,
M.M.

Anggota VI

Dr. Pius Lustrilanang, S.IP.,
M.Si., CFrA., CSFA.



Anggota VII

Dr. Slamet Edy Purnomo,
S.E., M.M.



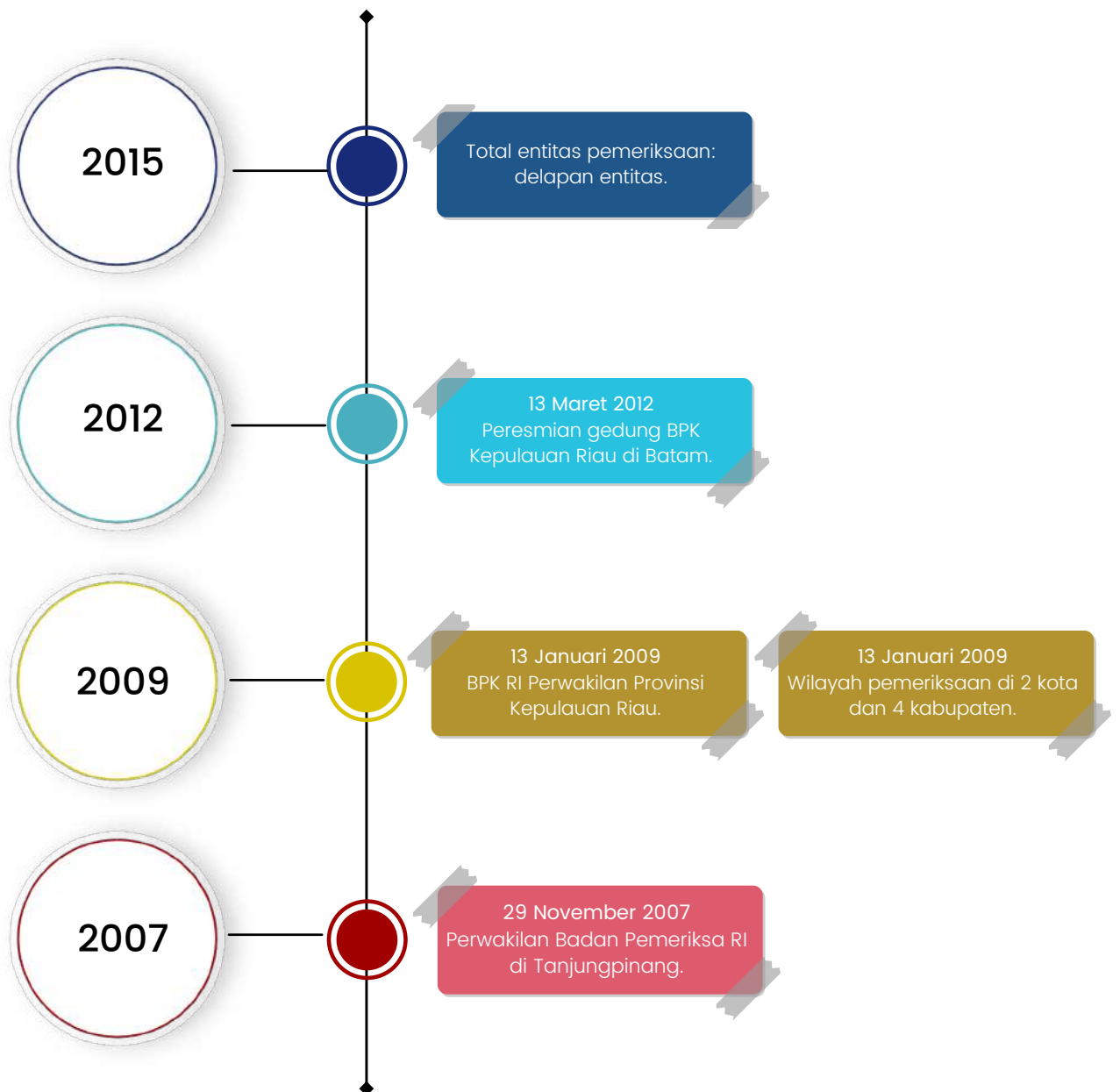
BPK PERWAKILAN KEPULAUAN RIAU

"Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi."

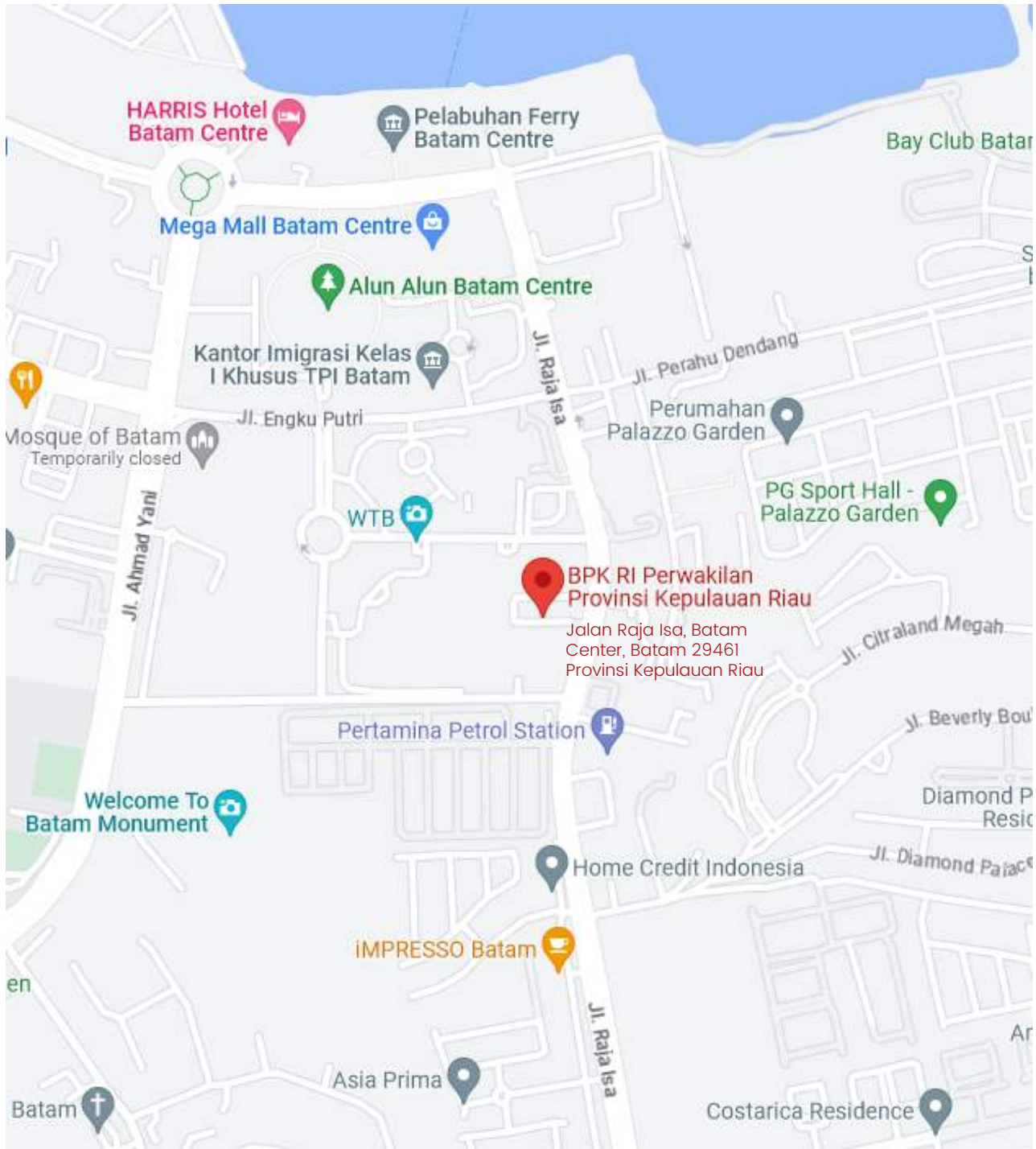
Pasal 23G ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945



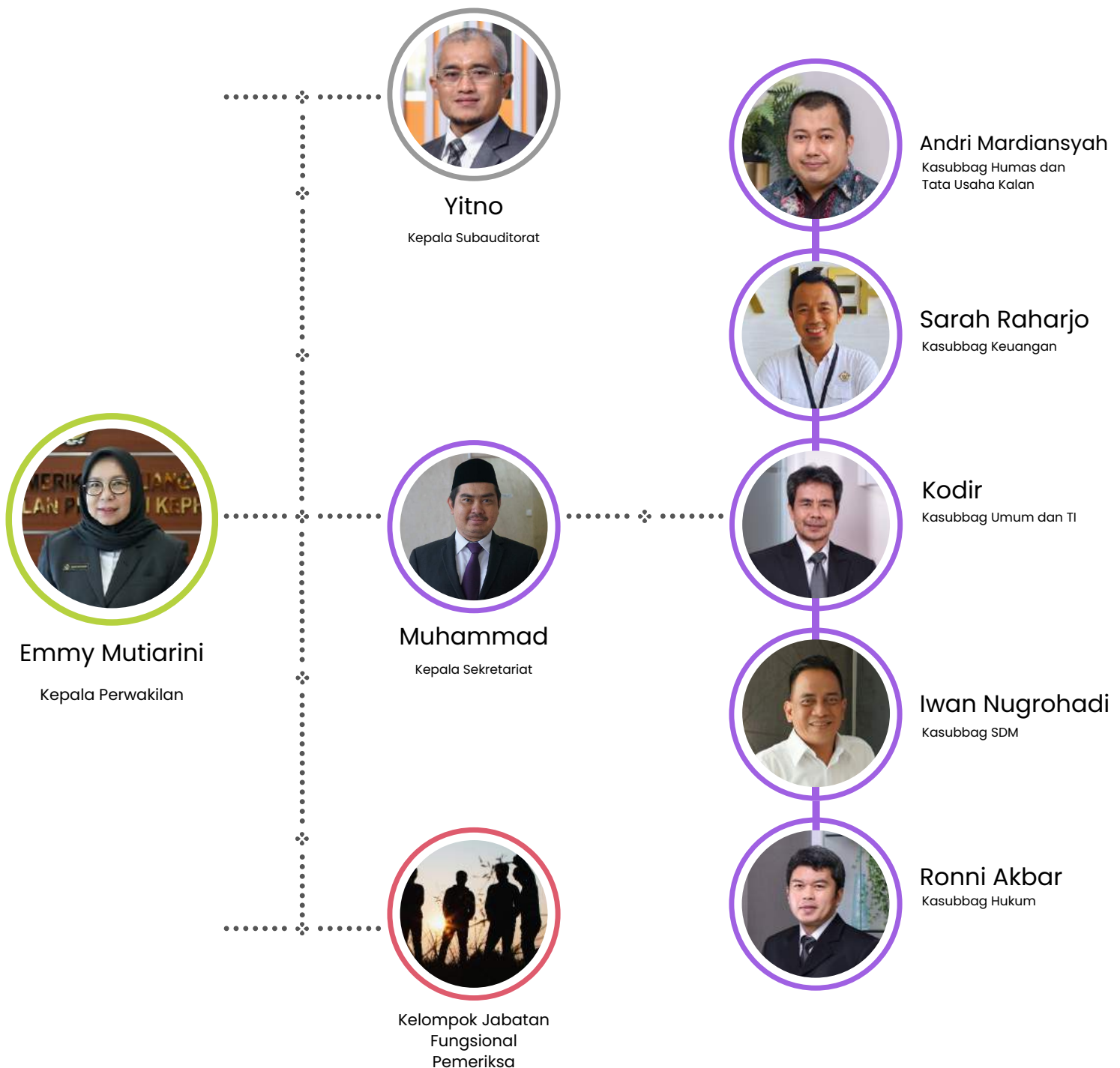
Sejarah Singkat BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau



Lokasi Kantor



Struktur Organisasi



KEPALA PERWAKILAN



Emmy Mutiarini S.E., Ak.,
M.Si., CA., CSFA., ACPA.

Dilahirkan di Palembang pada 28 September 1971, Emmy menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Sriwijaya pada tahun 1995 dan Pascasarjana Akuntansi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2005.

Riwayat Jabatan



KEPALA SEKRETARIAT



Muhammad S.H., M.Si.,
C.L.A.

Dilahirkan di Surabaya pada 4 Januari 1974, Iwan Fajar Nugroho menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Airlangga pada tahun 1996 dan S-2 Ilmu Hukum di Universitas Airlangga pada tahun 2006.

Riwayat Jabatan



Kasubbag Hukum
BPK Kep. Bangka Belitung

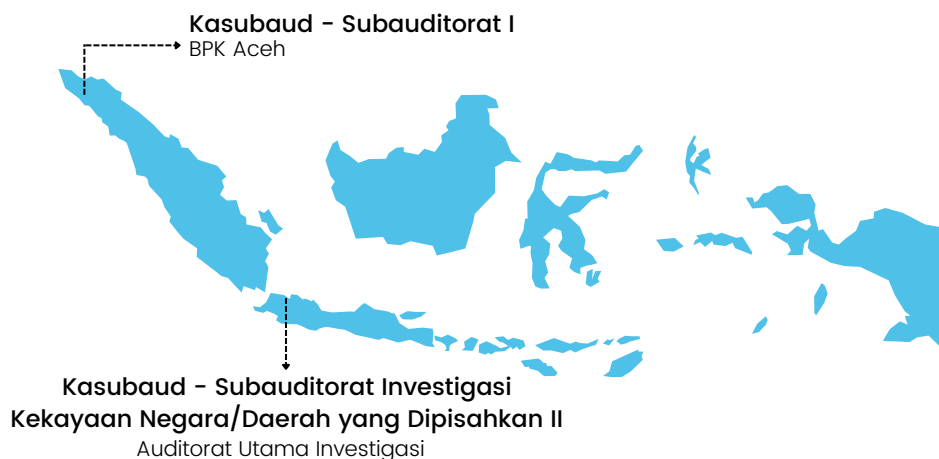
Kasubbag Hukum
BPK Sulawesi Tenggara

KEPALA SUBAUDITORAT



Dilahirkan di Pati pada 27 Juli 1977, Yitno menyelesaikan pendidikan Diploma IV Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2000 dan S-2 Akuntansi di Universitas Indonesia pada tahun 2005.

Riwayat Jabatan



KASUBBAG HUMAS DAN TU KALAN



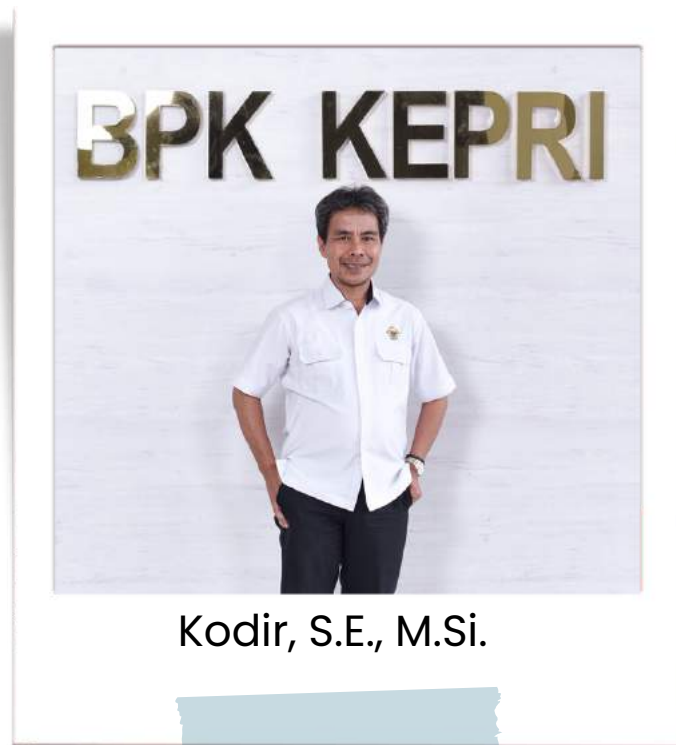
Andri Mardiansyah, S.E.,
M.M.

Dilahirkan di Jakarta pada 4 Maret 1977 Andri Mardiansyah menyelesaikan pendidikan S-1 Manajemen di Universitas Mpu Tantular pada tahun 1999 dan S-2 Manajemen di STIE Kusuma Negara pada tahun 2008.

Riwayat Jabatan

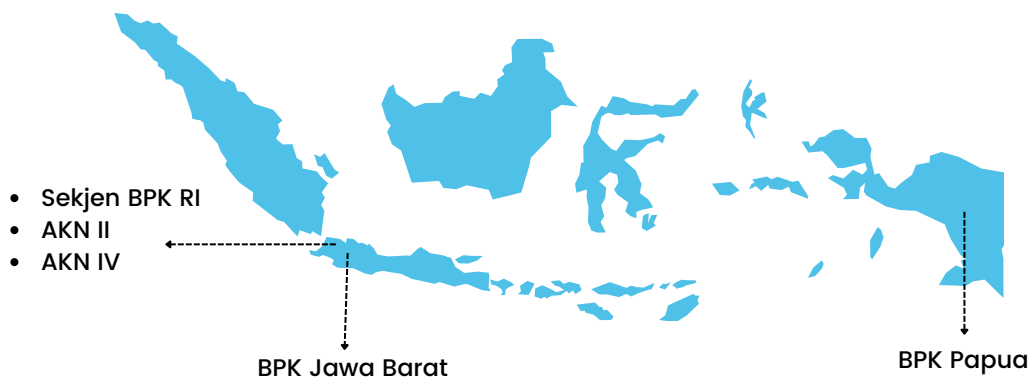


KASUBBAG UMUM DAN TI



Dilahirkan di Bogor pada 13 September 1967, Kodir menyelesaikan pendidikan S-1 Akuntansi di Universitas Pakuan pada tahun 1993 dan S-2 Ilmu Administrasi di STIE YAPPANN pada tahun 2011.

Riwayat Penempatan



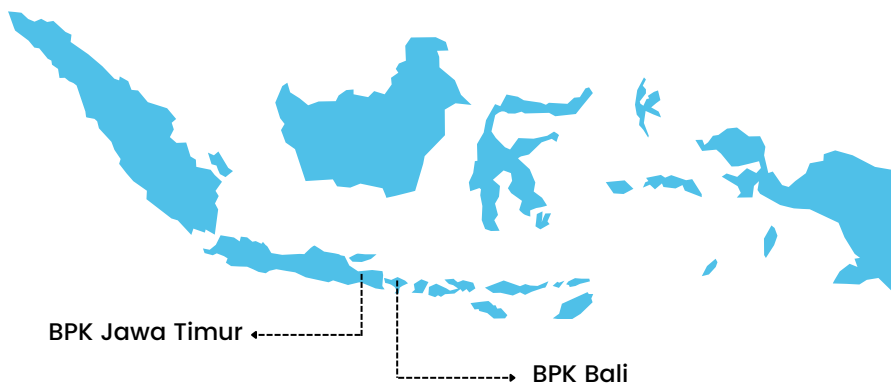
KASUBBAG KEUANGAN



Sarah Raharjo, S.E., M.M.,
Ak.

Dilahirkan di Sukoharjo pada 24 Agustus 1984, Sarah Raharjo menyelesaikan pendidikan S-1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2007 dan S-2 Manajemen di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar pada tahun 2019.

Riwayat Penempatan



KASUBBAG HUKUM



Ronni Akbar, S.H.

Dilahirkan di Jakarta pada 8 April 1976 Ronni, begitu beliau biasa disapa, menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Jenderal Soedirman pada Tahun 2002.

Riwayat Jabatan



KASUBBAG SDM



Iwan Nugrohadi, S.E., M.M.

Dilahirkan di Jakarta pada 27 Juni 1971, Iwan Nugrohadi menyelesaikan pendidikan S-1 Manajemen di STIE Gunadarma pada Tahun 1996 dan S-2 Manajemen di STIE Mahardhika pada Tahun 2020.

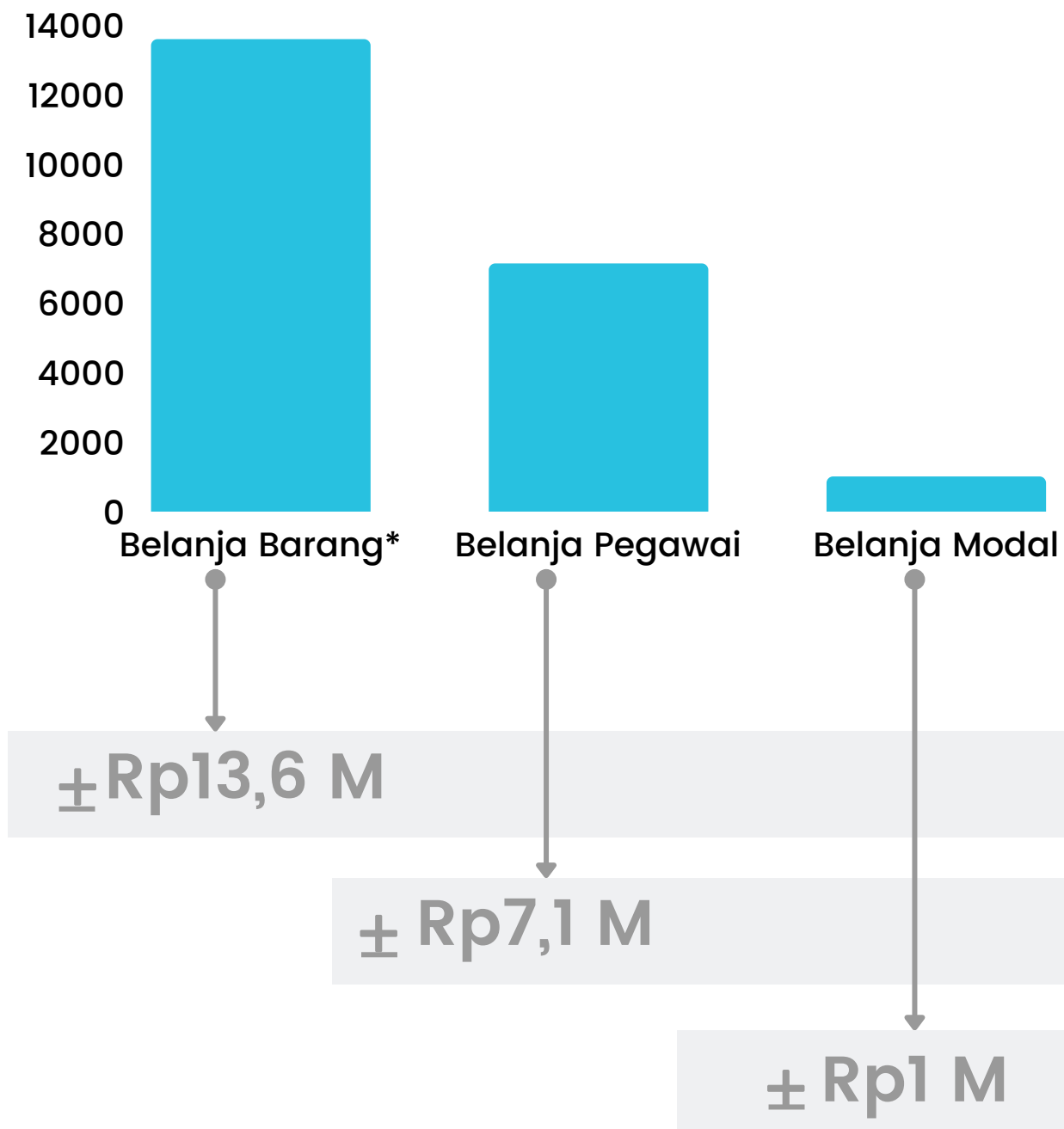
Riwayat Jabatan



Pelaksana
BPK Jawa Timur

Struktur Anggaran TA 2023

Total Anggaran TA 2023: Rp21.756.524.000,00



*Belanja Barang mencakup belanja untuk melaksanakan kegiatan Pemeriksaan

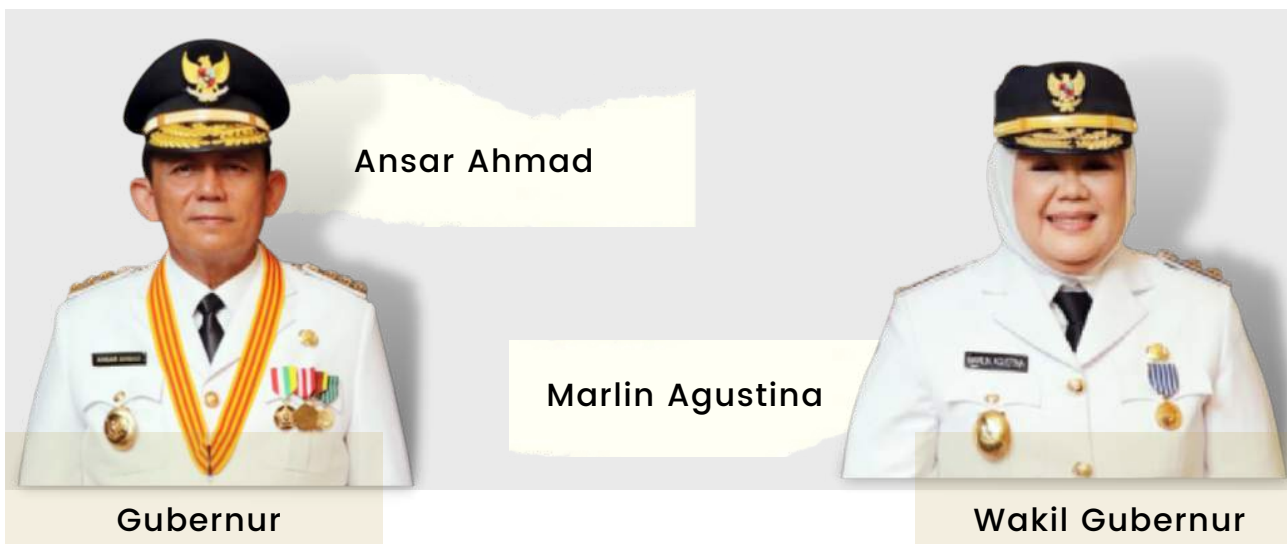


WILAYAH PEMERIKSAAN



PROVINSI KEPULAUAN RIAU

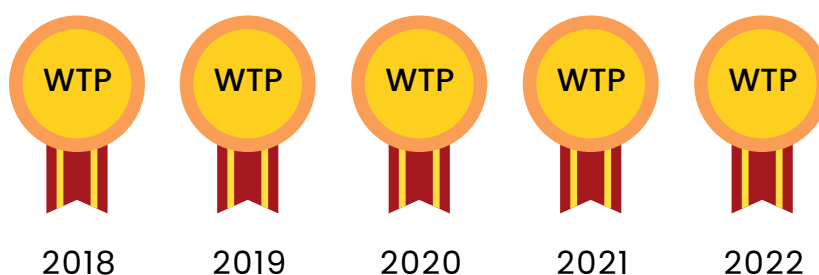
Negeri Segantang
Lada



Julukan "Negeri Segantang Lada" diberikan pada Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai penghasil lada terbesar di abad ke-19. Di masa itu, lokasi penanaman lada di Kepri terletak di Bintan, Batam, Lingga, dan beberapa daerah lainnya.

Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Wilayah Administrasi
252.601 km²	2.064.564 jiwa	5 kabupaten dan 2 kota

Tren Opini Laporan Keuangan Pemprov Kep. Riau





TANJUNG PINANG

Kota Gurindam
Dua Belas



Rahma

Walikota



Endang Abdullah

Wakil Walikota



Kota Tanjungpinang dijuluki "Kota Gurindam Dua Belas" karena di kota inilah Raja Ali Haji menuliskan karya sastra termasyur berjudul, "Gurindam Dua Belas".

Luas Wilayah

239.50 km²

Jumlah Penduduk

243.686 jiwa

Wilayah Administrasi

**4 kecamatan dan
18 kelurahan/desa**

Tren Opini Laporan Keuangan Pemko Tanjungpinang



2018



2019



2020

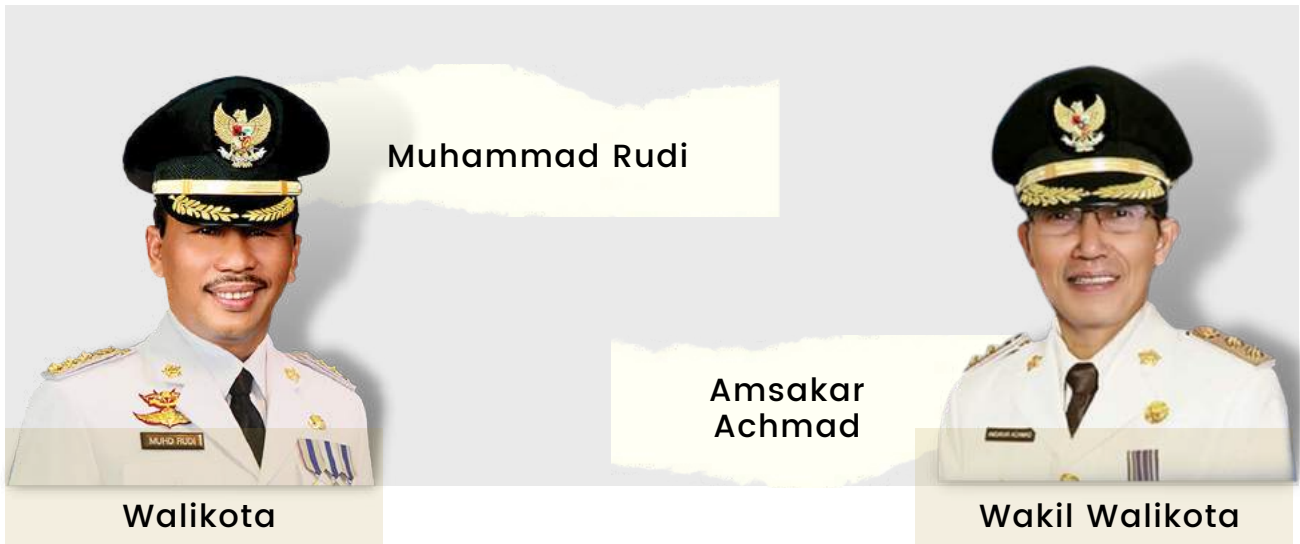


2021



2022





Muhammad Rudi

Amsakar Achmad

Walikota

Wakil Walikota



"Bandar Dunia Madani" bermakna kota yang beradab. Istilah ini tercantum di dalam visi Kota Batam, yaitu "Terwujudnya Kota Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern".

Luas Wilayah

1.575 km²

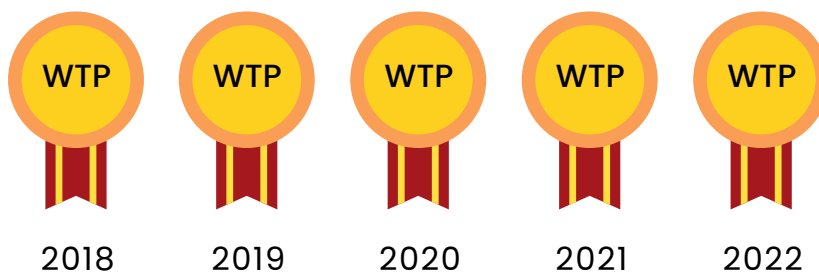
Jumlah Penduduk

1.196.396 jiwa

Wilayah Administrasi

**12 kecamatan dan
64 kelurahan/desa**

Tren Opini Laporan Keuangan Pemko Batam





BINTAN

Kepulauan Segantang
Lada



Roby Kurniawan,
S.P.W.K

Bupati



Bintan mempunyai ciri khas terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di Laut Cina Selatan, karena itulah julukan Kepulauan “Segantang Lada” sangat tepat untuk menggambarkan betapa banyaknya pulau yang ada di daerah ini.

Luas Wilayah

88.038,54 km²

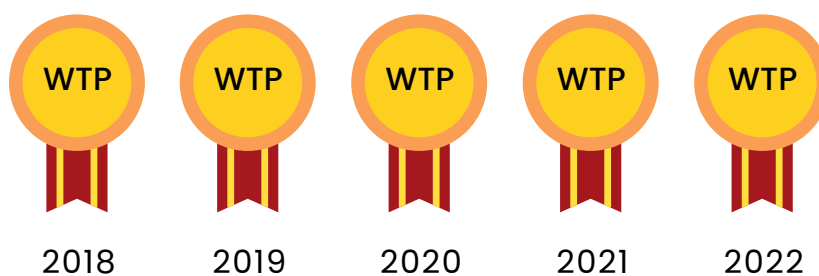
Jumlah Penduduk

155.456 jiwa

Wilayah Administrasi

**10 kecamatan dan
51 kelurahan/desa**

Tren Opini Laporan Keuangan Pemkab Bintan

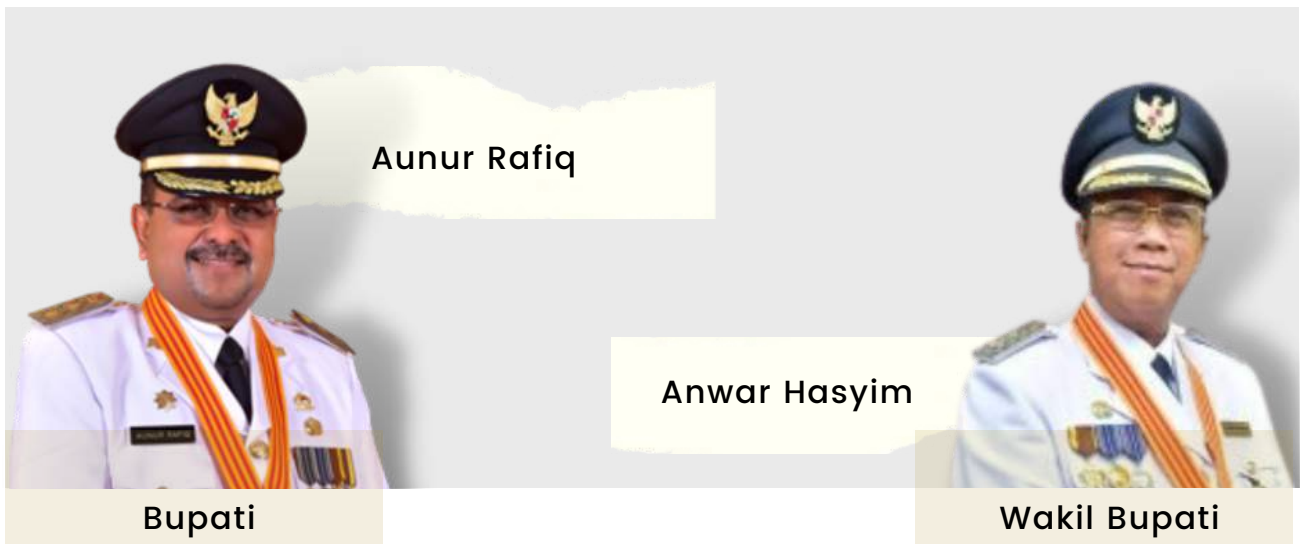




KARIMUN

Bumi Berazam





Aunur Rafiq

Anwar Hasyim

Bupati

Wakil Bupati



Kata "azam" memiliki dua arti, yakni teramat mulia dan tujuan. Karimun memiliki empat azam (tujuan) penggerak, yaitu azam peningkatan iman dan takwa, azam peningkatan kualitas SDM, azam peningkatan ekonomi yang berdimensi kerakyatan, dan azam pengembangan seni dan budaya.

Luas Wilayah

1.524 km²

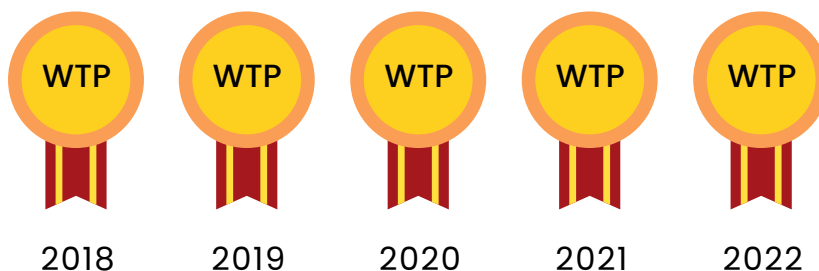
Jumlah Penduduk

225.866 jiwa

Wilayah Administrasi

**12 kecamatan dan
29 kelurahan/desa**

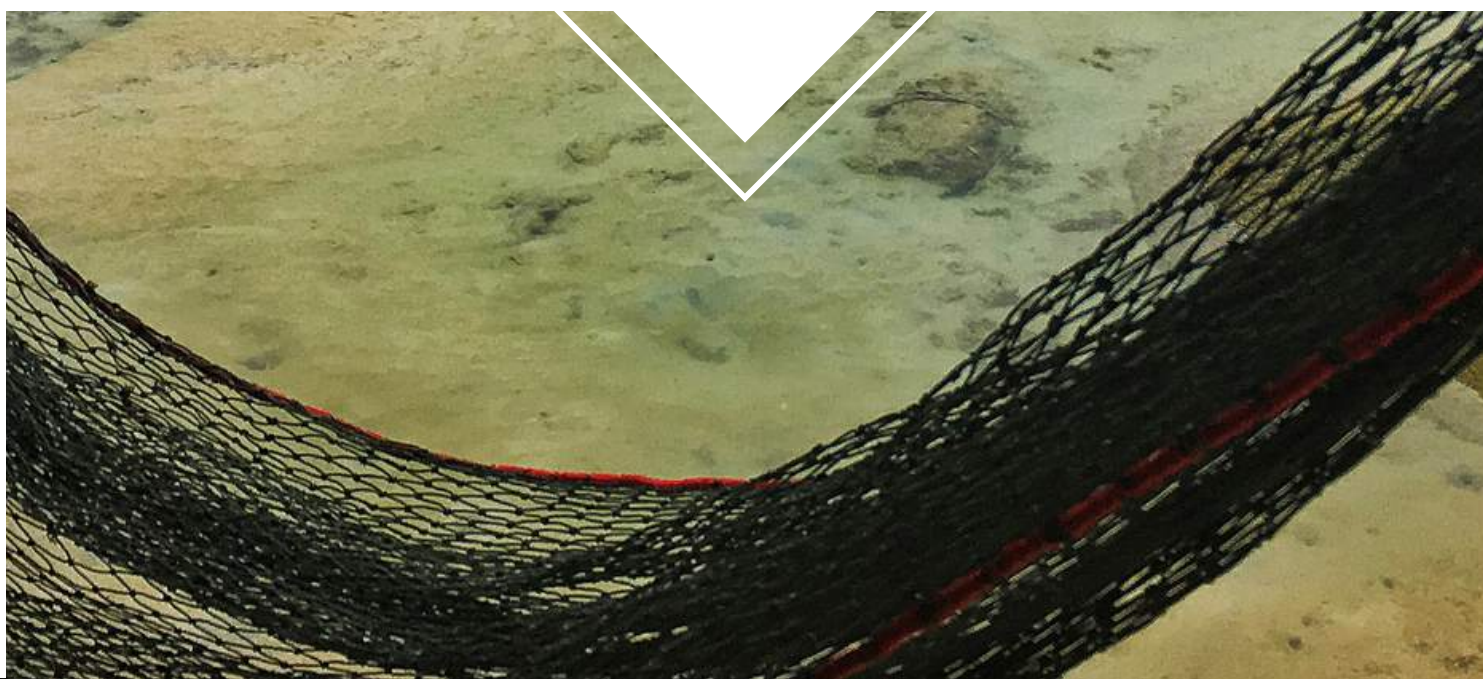
Tren Opini Laporan Keuangan Pemkab Karimun

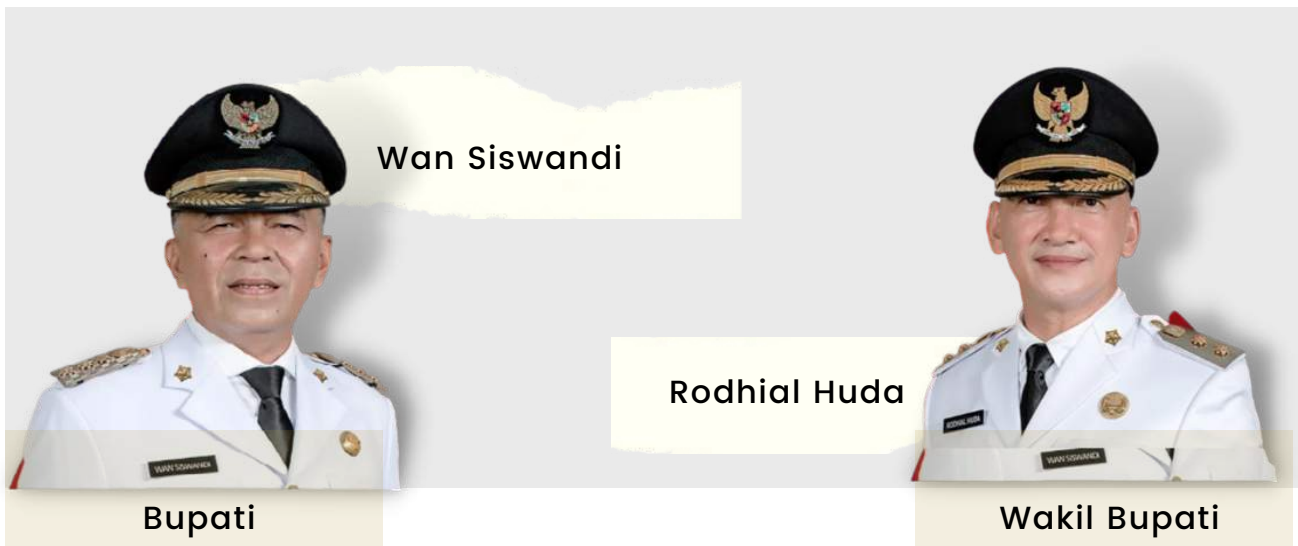




NATUNA

Mutiara di Ujung Utara

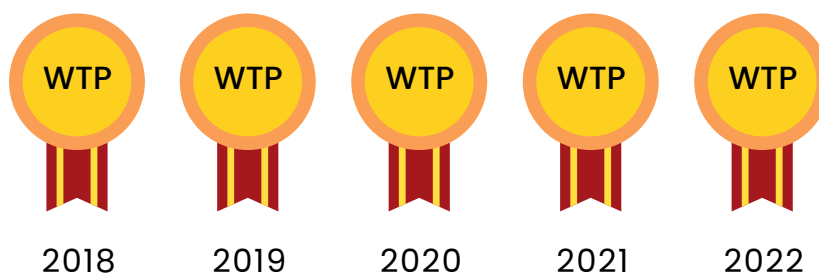




Asal muasal nama kabupaten ini berasal dari bahasa Belanda "Natunae" yang berarti alami. Nama ini sesuai dengan pesona alam yang terhampar di Pulau Natuna, seperti pantai pasir putih yang dipadukan dengan air laut yang jernih serta hamparan terumbu karang yang indah.

Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Wilayah Administrasi
264.198 km²	74.977 jiwa	15 kecamatan dan 76 kelurahan/desa

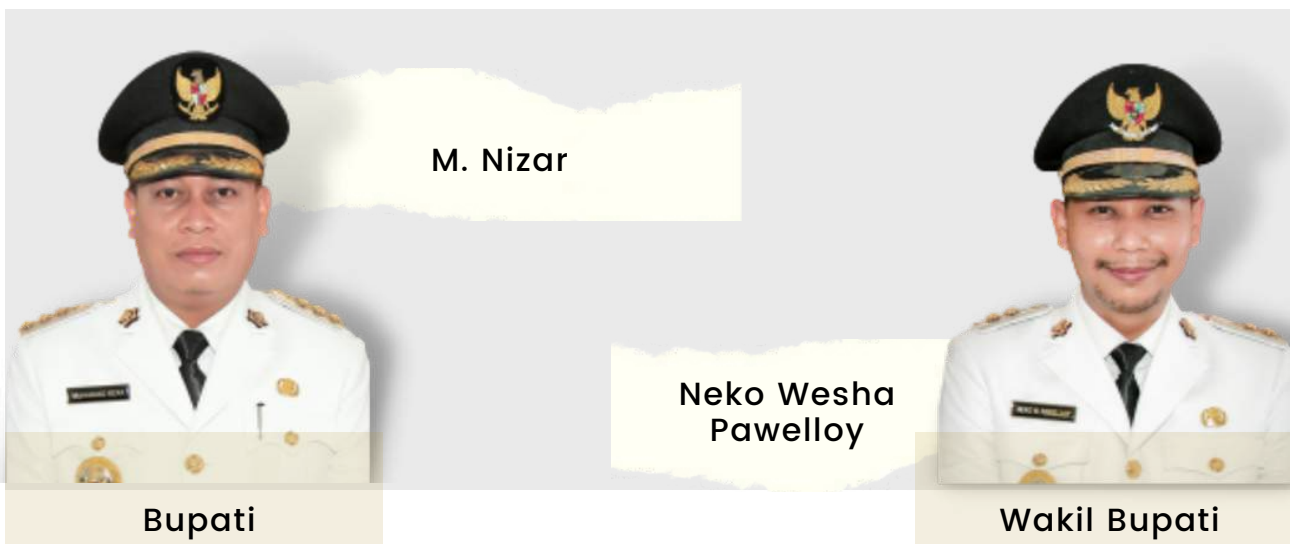
Tren Opini Laporan Keuangan Pemkab Natuna





LINGGA

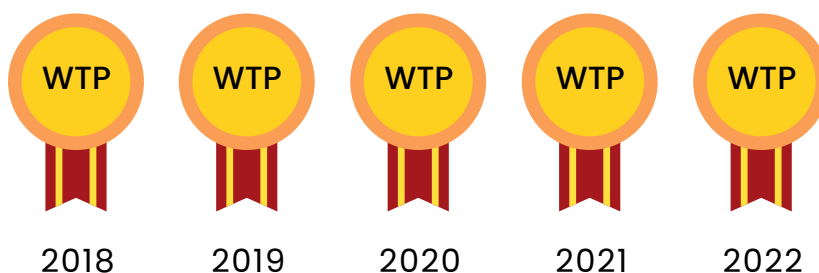
Negeri Bunda Tanah
Melayu



Kabupaten Lingga dulunya adalah pusat kerajaan Melayu, terutama saat Kesultanan Lingga berkuasa antara tahun 1878 hingga 1900 di Daik. Sisa-sisa peninggalan kerajaan tersebut hingga kini masih dapat dilihat. Oleh sebab itulah Lingga memiliki julukan "Negeri Bunda Tanah Melayu".

Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Wilayah Administrasi
45.508,66 km²	98.633 jiwa	5 kecamatan dan 59 kelurahan/desa

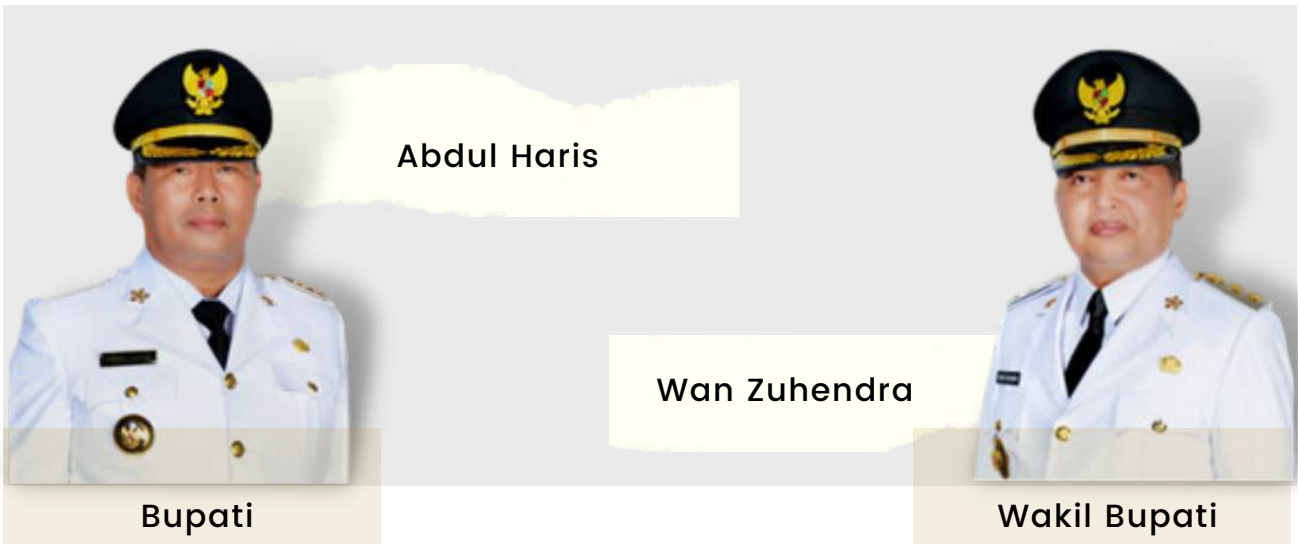
Tren Opini Laporan Keuangan Pemkab Lingga





KEPULAUAN ANAMBAS

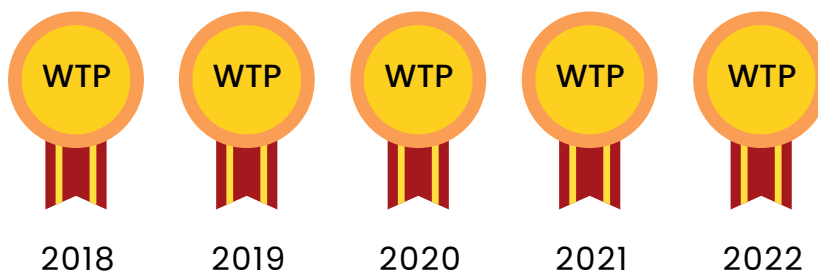
Surga Tropis



Dijuluki "Surga Tropis, Kepulauan Anambas dikaruniai keanekaragaman hayati laut yang eksotis, di mana sebagiannya adalah bagian dari Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) yang dikenal dengan Taman Wisata Perairan (TWP) Kepulauan Anambas dan laut sekitarnya.

Luas Wilayah	Jumlah Penduduk	Wilayah Administrasi
590,1 km²	42.744 jiwa	10 kecamatan dan 82 kelurahan/desa

Tren Opini Laporan Keuangan Pemkab Kep. Anambas



Fasilitas Kantor

Pusat Informasi dan Komunikasi



Klinik



Perpustakaan



Ruang Rapat



Auditorium



Ruang Terbuka Hijau



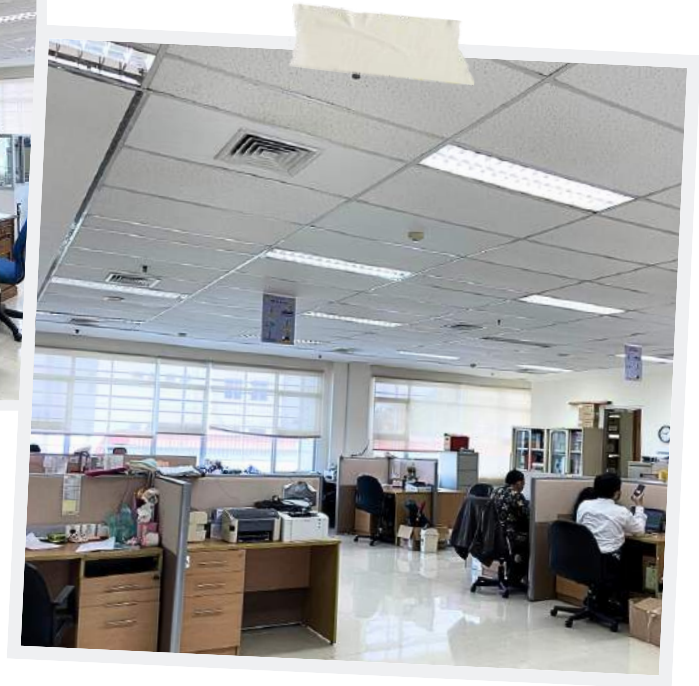
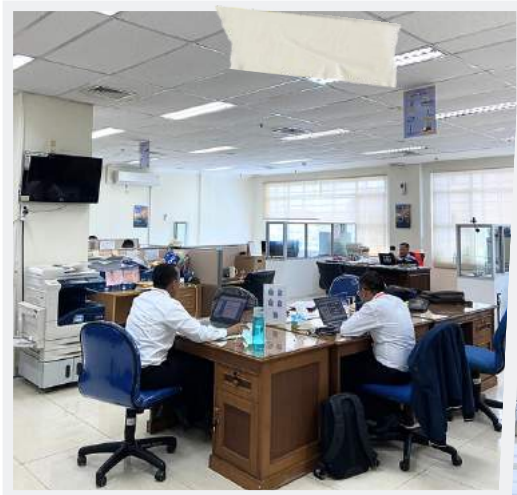
Masjid Baitul Hasib





UNIT KERJA BPK KEPRI

Subauditorat



Subauditorat Kepulauan Riau mempunyai tugas yang melingkupi kegiatan pemeriksaan di lingkungan entitas, mulai dari merumuskan kegiatan pemeriksaan, mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah, hingga melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan.

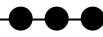
Subauditorat juga bertugas menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Sekretariat Perwakilan



Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Humas dan TU Kalan



Subbagian Humas dan TU Kalan mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- 01** Kegiatan seputar kehumasan
- 02** Mengelola perpustakaan
- 03** Kesekretariatan
- 04** Keprotokolan
- 05** Menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh kalan
- 06** Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK
- 07** Menyimpan Data Entitas Pemeriksaan

Keuangan



Subbagian Keuangan mempunyai tugas dan tanggung jawab:

01 Melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, dan penatausahaan

02 Pertanggungjawaban keuangan

03 Menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK Kepri

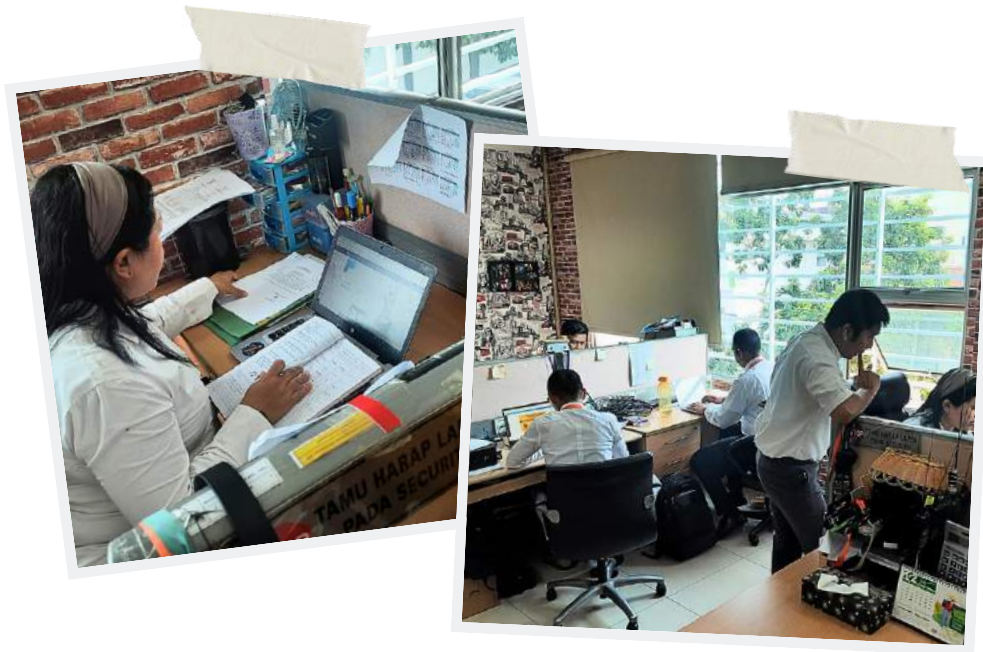
Sumber Daya Manusia



Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas dan tanggung jawab:

Melaksanakan pengurusan Sumber Daya Manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, seperti administrasi data kepegawaian, penghargaan pegawai, kenaikan pangkat, dan diklat.

Umum dan Teknologi Informasi



Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas dan tanggung jawab:

01

Memberikan layanan administrasi umum

02

Mengelola arsip dan teknologi informasi

03

Mengurus sarana dan prasarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Hukum



Subbagian Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab:

Memberikan layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.



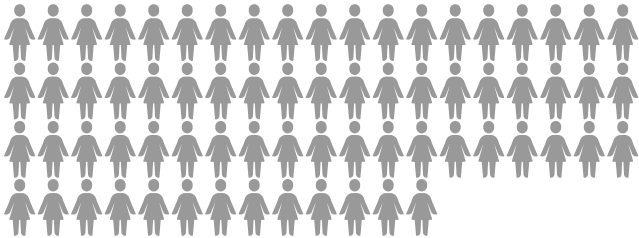
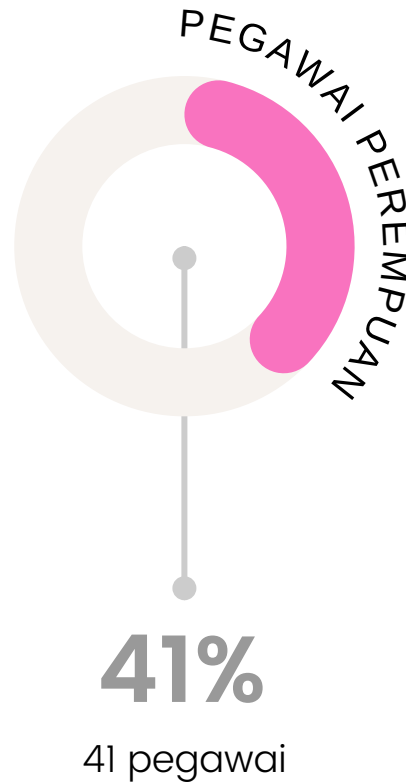
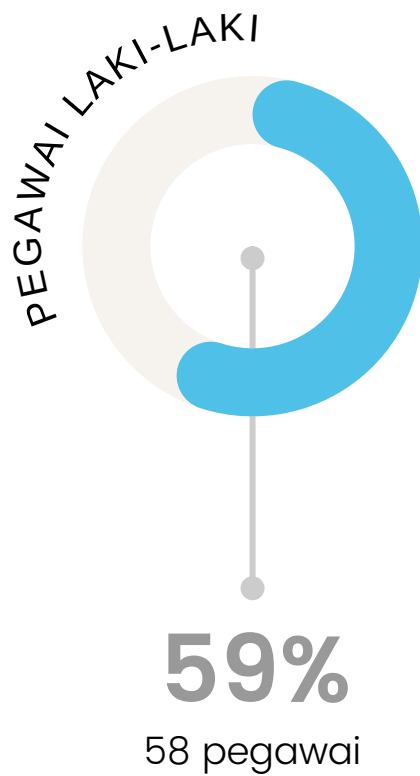
INFORMASI

SDM

BPK KEPRI

Statistik Pegawai

Total pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau per Desember 2023 berjumlah 99 orang.



8 pejabat struktural


69 pejabat fungsional
pemeriksa


22 staf pendukung dan
penunjang



BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Jalan Raja Isa, Batam Center, Batam 29461
Provinsi Kepulauan Riau

 (0778) 468575

 08127778746

 humastu.kepri@bpk.go.id | bpkkepri2017@gmail.com